

PEMBICARA:

1. Faisal H. Basri, MA
(Dosen dan pengamat ekonomi)
2. Dr. Marcus Mietzner
(Ahli ilmu politik, Indonesianist dan pengajar di Australian National University, Canberra)

MODERATOR:

Dr. Ignas Kleden

(Chairman Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, pengajar program paska sarjana jurusan sosiologi UI)

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Selamat malam. Kita akan segera mulai diskusi kita malam ini. Pertama-tama terima kasih sudah datang ke tempat ini. Kita mengundang 2 pembicara malam ini tapi Pak Faisal terjebak macet. Tema diskusi kita malam ini adalah “Demokrasi, Efektivitas Politik dan Legitimasi”.

Sebetulnya soal yang ingin kita bahas malam ini adalah setelah reformasi, Indonesia mengalami keterbukaan politik yang cukup besar dan suasana yang jauh lebih demokratis dibanding masa Orde Baru. Tetapi pertanyaan kita adalah apa yang harus kita lakukan kalau keterbukaan politik dan suasana demokratis itu tidak membawa perbaikan di dalam kesejahteraan dan khususnya perbaikan dalam *public services*, dalam pelayanan publik.

Kami mencatat beberapa poin diskusi yang dilakukan oleh para ahli tentang hubungan diantara demokrasi dan pembangunan. Anda bisa baca disitu. Tetapi masalah yang saya harap akan dibahas oleh pembicara kita malam ini adalah beberapa masalah yang dicatat di bagian terakhir di kerangka acuan itu, yaitu:

- Pertama apakah benar buat kita di Indonesia bahwa negara dengan kaya sumber daya alam tetapi dengan pendapatan perkapita rendah mengalami kesulitan dalam mendorong demokrasi karena elitnya cenderung mempraktekkan patronase politik. Karena itu sebetulnya adalah salah satu tesa yang diajukan oleh orang Bank Dunia yang bernama Paul Collier. Dia mengatakan bahwa demokrasi mendorong pembangunan ekonomi kalau demokrasi terlebih dulu

mendorong perbaikan dan reformasi di dalam *policy*, dalam kebijakan. Sedangkan kebijakan itu adalah sebagai hasil dari dinamika dalam negeri dan bukan desakan dari luar. Menurut dia, apa yang dinamakan *policy conditionality* selama 20 tahun itu tidak memberikan hasil.

- Pertanyaan kedua. Apakah benar bahwa biaya transaksi politik dalam pemilu lebih murah daripada biaya yang diberikan untuk pelayanan publik? Itu juga salah satu yang mereka temukan, bahwa seringkali elit-elit politik di negara-negara berkembang itu lebih memilih membayar sewa kepada konstituennya, karena lebih murah dibandingkan ia menjanjikan mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, membuka jalan raya. Jadi singkatnya transaksi politik itu biayanya lebih rendah daripada biaya pelayanan publik.
- Mengapa di Indonesia itu sebetulnya penyelenggaraan pemilu itu belum diimbangi dengan *checks and ballances* yang lebih baik. Menurut kedua ahli yang saya kutip disini, sebenarnya demokrasi itu terdiri dari *electoral competition* dalam pemilu dan penggunaan kekuasaan dalam *checks and ballances*. Menurut mereka seringkali pemilu itu berjalan, tetapi *checks and ballances* tidak berjalan.
- Berikut adalah pertanyaan umum mengenai kebebasan. Apakah dalam politik dan ekonomi Indonesia berlaku prinsip kebebasan? Bahwa setiap orang punya kebebasan sejauh dia tidak merugikan kebebasan orang lain. Bagaimana terjemahannya dalam politik dan ekonomi disini.
- Bagaimana mengatasi kekecewaan publik terhadap rendahnya atau minimnya pelayanan publik dan munculnya pemikiran untuk kembali ke pemerintahan yang lebih otoriter asal efektif. Karena ada pikiran-pikiran begitu yang muncul.
- Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memungkinkan pembangunan dari dalam negeri dengan *policy* yang dibuat oleh dalam negeri sendiri. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh dua ahli ini mengatakan bahwa pembangunan-pembangunan yang kurang lebih "dimiliki" oleh kekuatan-kekuatan luar seperti IMF dan Bank Dunia itu lebih sering gagal dibandingkan dengan negara-negara yang tidak terlalu peduli dengan apa yang dikehendaki oleh Bank Dunia dan IMF. Mereka memiliki kebijakan sendiri seperti Cile, Korea, Vietnam. Jadi *home-grown development*. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memungkinkan *home-grown democracy* tetapi tidak terjebak dalam pandangan bahwa demokrasi itu bersifat spesifik, khas dan *particular*, sehingga kita tidak bisa menggunakan kriteria-kriteria umum demokrasi untuk menilai perkembangan demokrasi. Jadi bagaimana *home-grown democracy* berjalan tetap mempertahankan nilai-nilai universal demokrasi.

Saya tidak mau bicara lebih panjang. Pembicara kita malam ini Dr. Marcus Mietzner, seorang Indonesianist dari generasi baru. Asal Jerman tetapi sekarang mengajar di Australian National University di Canberra, mengajar ilmu politik dan menulis buku politik tentang Indonesia. Saya kira saya ingin segera mempersilahkan saudara Marcus untuk memulai.

Dr. Marcus Mietzner, Pembicara

Saya melihat ada 5 orang yang lancar Bahasa Jerman, jadi saya pakai bahasa Jerman saja bagaimana? Ok bahasa Indonesia saja. Saya diminta malam ini untuk membicarakan beberapa hal, tadi sudah disebutkan beberapa. Nanti dalam pembicaraan saya mau fokus pada 5 hal:

1. Pertama, Hubungan Efektifitas Pemerintahan dan Demokrasi. Memang ada diskusi yang sangat menarik dalam ilmu politik tentang persoalan tersebut. Apakah suatu sistem yang benar-benar demokratis pada saat yang sama bisa sangat efektif? Atau apakah kita harus berkompromi? Misalnya efektifitasnya berkurang, demokrasinya bertambah atau bagaimana hubungan diantara dua faktor tersebut?
2. Kedua, yang tidak kalah menarik adalah hubungan antara pendapatan dan demokrasi. Misalnya apakah pendapatan per kapita sekian ratus baru suatu negara bisa berdemokrasi atau bagaimana. Itu terjadi juga perdebatan antara ahli-ahli politik. Tapi tentunya kita akan membicarakan dalam konteks perkembangan di Indonesia.
3. Ketiga, sesuatu yang dikatakan dalam paper ini bahwa banyak orang Indonesia ingin kembali ke otoriterisme. Apakah itu benar atau tidak? Saya nanti akan membicarakan persoalan tersebut juga.
4. Keempat soal pemilu. Radi pak Ignas mengatakan bahwa ada perdebatan tentang kualitas pemilu bertambah dan kekurangan *check and ballances* di lain pihak. Itu bagaimana di lapangan?
5. Kelima soal *home-grown development*. Bagaimana itu bisa dicapai di Indonesia?

Jadi yang pertama, dan itu juga ada dalam judul tentang hubungannya antara Efektifitas dan Demokrasi. Larry Diamond misalnya bilang, kalau suatu demokrasi itu menurun kualitasnya, rata-rata penyebabnya adalah kekurangan efektifitas pemerintahan. Jadi suatu pemerintah yang tidak mampu menjamin pertumbuhan ekonomi, tidak bisa menyediakan lapangan kerja, tidak bisa menyediakan pelayanan kesehatan misalnya. Kalau suatu pemerintahan tidak efektif, suatu demokrasi dalam bahaya. Dia menunjukkan itu di banyak negara misalnya di Rusia, di Venezuela

dan lain-lain. Dimana kekurangan efektifitas pemerintahan menyebabkan munculnya otoritarisme baru di negara-negara tersebut.

Sebenarnya Indonesia adalah suatu kasus yang sangat menarik karena tidak sesuai dengan teorinya Larry Diamond tersebut. Di Indonesia memang kita melihat mayoritas masyarakat Indonesia tidak puas dengan pelayanan publik, masyarakat Indonesia berpendapat bahwa pelayanan publik kurang, efektifitas pemerintahan kurang. Namun kalau ditanya, "apakah masih mendukung demokrasi?" itu masih stabil. Dari sudah 5, 6, 7 tahun ini stabil 75%. Itu berarti orang Indonesia tidak mengurangi dukungan terhadap demokrasi tetapi pada saat yang sama menilai bahwa efektifitas pemerintahan kurang.

Itu sangat menarik di Indonesia. Karena kalau kita mengikuti logikanya Larry Diamond, kita harus melihatnya di lapangan bahwa terjadi penurunan di dua bidang itu: penurunan dalam penilaian terhadap efektifitas pemerintahan dan pada saat yang sama dukungan terhadap demokrasi. Tetapi itu tidak terjadi. Menurut saya itu sangat positif, bahwa masyarakat Indonesia menilai bahwa ada hal-hal lain yang penting dalam demokrasi dan bukan cuma efektifitas pemerintahan.

Itu misalnya diungkapkan oleh Thomas Howbes (?) dia mengkritik Larry Diamond. Dia bilang itu terlalu terfokus terhadap efektifitas pemerintahan. Sedangkan sebenarnya seorang warga negara menilai demokrasi juga dari hal-hal yang lain seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan memilih apakah pemilu itu efektif atau tidak. Jadi Indonesia menjadi contoh yang baik dimana demokrasi tetap dipertahankan oleh suatu masyarakat walaupun penilaian terhadap efektifitas dalam pemerintah berkurang.

Menarik juga setiap tahun World Bank mengeluarkan indikator-indikator pemerintahan. Dan ada satu diantaranya soal efektifitas pemerintahan. Kalau dibandingkan efektifitas pemerintahan saat ini dengan jaman Soeharto, pada jaman Soeharto efektifitas pemerintahan tinggi nilainya. Tetapi pada saat yang sama, bagian-bagian lainnya, misalnya kebebasan berpendapat itu nilainya nol. Misalnya tahun 1997, tahun terakhir Soeharto masih berkuasa, Freedom House kasih nilai 7 ke Indonesia untuk nilai kebebasan berpendapat. Itu nilai yang paling jelek. Sedangkan Bank Dunia kasih nilai sangat tinggi dalam bidang efektifitas pemerintahan. Jadi ini menarik untuk melihat bahwa efektifitas pemerintahan tidak menjamin berlangsungnya demokrasi. Jadi untuk ahli politik, secara komparatif, Indonesia adalah kasus yang menarik. Kita nanti bisa membicarakan kenapa hal itu terjadi.

Kedua, hubungan antara pendapatan dan demokrasi. Disitu juga terjadi diskusi yang hangat di kalangan ahli politik. Ada yang berpendapat bahwa suatu negara harus berpendapatan sekian perkapita GDP baru bisa berdemokrasi. Dulu, Huntington misalnya bilang harus 3500 dolar per kapita GDP baru suatu negara bisa menghindari terjadinya kup militer. Di Indonesia, ada Pak Juwono Soedarsono, yang dari dulu mengatakan kalau Indonesia mau benar-benar berdemokrasi secara baik harus 8.000 USD per kapita GDP. Saat ini Indonesia 3.000 dolar. Jadi baik angka-angka yang dipakai Huntington maupun yang dipakai Juwono Soedarsono, itu masih kurang. Kalau kita ikut logikanya Huntington, seharusnya Indonesia dibawah pemerintahan militer, tapi ternyata tidak. Kalau mengikuti logikanya Juwono Soedarsono, seharusnya Indonesia itu bukan negara demokrasi. Tetapi kalau ditanya ke semua lembaga yang menilai, apakah itu Politifull (?) Freedom House, Economist (?), semua menilai Indonesia adalah negara demokrasi.

Jadi hubungan antara pendapatan dan demokrasi tidak sekuat seperti yang banyak orang bayangkan. Seperti yang kita tahu semua bahwa banyak negara kaya itu tidak demokratis. Saudi Arabia, Singapura, Bahrain, Abu Dhabi, ini semua negara yang pendapatan per kapita GDP-nya sangat tinggi, tetapi demokrasinya tidak ada. Jadi kita harus mempertanyakan hubungan-hubungan seperti itu. Di lain pihak baru keluar Timor Leste Index oleh the Economist, 2010. Disitu negara Timor Leste misalnya indeks demokrasinya (?) itu diatas Indonesia, sedangkan Timor Leste pendapatan per kapita GDP-nya kalau tidak salah 500-600, sedangkan Indonesia 3000. Jadi hubungan itu memang ada, tetapi tidak seabsolut yang banyak orang pikirkan.

Juga kalau kita misalnya membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Thailand misalnya pendapatan per kapita GDP-nya 2 kali lipat dibanding Indonesia. Sedangkan yang kita amati di Thailand saat ini demokrasinya kacau sekali dan tidak ada harapan 2, 3, 4 tahun ke depan bahwa demokrasi bisa dikembangkan disitu. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk mempertanyakan hubungan antara pendapatan dengan demokrasi.

Ketiga, yang ingin saya bicarakan adalah soal apakah ada kecenderungan masyarakat Indonesia ingin kembali ke otoriterisme atau tidak? Tadi saya menyebutkan bahwa survei-survei tentang demokrasi di Indonesia dari 7 tahun terakhir ini stabil sekali. Jadi kalau orang ditanya apakah ingin mempertahankan demokrasi, 75% menjawab iya. Jadi sebenarnya kalau

kita dengar di seminar-seminar omongan bahwa orang rindu pada Pak Harto segala macam, dalam survei yang obyektif itu tidak kelihatan.

Jadi anekdot-anekdot itu memang ada, tetapi bahwa ada kecenderungan besar, ada gelombang besar orang yang ingin kembali ke orde baru, saya tidak melihat itu. Dan kembali yang saya katakan tadi, walaupun banyak orang tidak puas dengan pelayanan publik misalnya tidak menyebabkan orang tersebut mengekspresikan keinginan kembali ke orde baru. Jadi saya mempertanyakan apakah itu benar, mungkin kita bisa buka diskusi nanti. Saya sering mendengar itu di seminar di Jakarta bahwa orang di kampung hanya memperhitungkan perut, hanya memperhitungkan dapat makan atau tidak, mereka tidak berpendidikan, mereka tidak tahu apa itu demokrasi. Itu sangat kritis sebenarnya pendekatan itu. Kita misalnya sebagai orang akademisi atau pengamat politik, dari Jakarta menilai apa sikap politik di desa-desa. Saya mengajak kita untuk hati-hati dalam menilai sikap masyarakat di desa. Karena kalau ditanya oleh LSI misalnya, apakah masih mendukung demokrasi, hanya 25% yang agak ragu-ragu, mayoritas besar tetap ingin demokasi berjalan di Indonesia.

Keempat soal pemilu, apakah ada perbedaan, atau ketidakcocokan antara kualitas pemilu dengan kekurangan *checks* dan *balances*. Itu juga berhubungan dengan pertanyaan Pak Ignas tadi, seperti teori politik di banyak negara lain apakah elit politik lebih mementingkan membiayai kampanye politik dibanding membiayai pelayanan publik. Saya rasa di Indonesia kebenarannya di tengah-tengah. Memang ada di dalam Pilkada orang mengeluarkan dana untuk membeli suara. Itu tentu saja ada. Kita semua tahu kasusnya. Tetapi ada juga bupati-bupati misalnya yang menawarkan pelayanan kesehatan gratis atau membebaskan orang tua dari biaya sekolah. Nah, bupati-bupati itu yang menang.

Kalau kita melihat di seluruh di Indonesia, siapa yang menang dalam Pilkada, adalah bupati yang memperhatikan soal pelayanan publik khususnya soal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Itu bukan berarti pendidikan besar dan kualitasnya sangat tinggi. Tetapi mereka menggunakan pendapatan daerah untuk membebaskan orang untuk ongkos pergi ke dokter atau sekolah. Itu sangat efektif untuk memenangkan. Jadi sebenarnya tidak ada ketegangan antara disatu pihak membiayai pemilu dengan membiayai pelayanan publik. Banyak bupati yang berhasil menggabungkan kedua pendekatan itu.

Apakah berarti bupati-bupati tersebut tidak korup? Tidak. Justru yang paling korup seperti di Kutai Kertanegara, itu sangat pintar. Dia memang mengantongi banyak dana untuk diri sendiri, tetapi pada saat yang sama

dia bagi-bagi ke masyarakat. Dia membebaskan masyarakat dari ongkos sekolah, dia menawarkan kesehatan yang gratis. Sebagai hasilnya dia dipilih kembali, sebelum ditangkap oleh KPK. Sekarang yang menang disitu anaknya, karena dia pakai pendekatan yang sama.

Jadi elit politik yang cerdas, dia tahu dia tidak bisa mengantongi duitnya sendiri atau bagi-bagi 20 ribu (rupiah), bukan. Dia tahu dia harus menawarkan pelayanan publik yang memuaskan. Sekali lagi itu tidak berarti bahwa pelayanan publik di Indonesia memuaskan. Tetapi di banyak daerah khususnya yang kaya *resources*, yang itu juga di dalam teori anda itu. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan banyak kabupaten-kabupaten yang pendapatan lokal tinggi, justru itu yang membebaskan pelayanan publik dan bupati-bupati di situ berhasil dalam pilkada.

Saya melihat ada *money politics* dan segala macam, ada banyak calon yang mencoba membeli suara dengan Rp. 20.000, Rp. 50.000, tetapi ada juga yang jauh lebih cerdas dan mereka menawarkan pelayanan publik dalam pilkada dan mereka menang. Jadi ada dua sisi dari cerita yang sama tersebut.

Secara umum tentang pemilu di Indonesia memang harus diakui secara komparatif di Asia Tenggara. Thailand misalnya sudah dari tahun 2005 menyelenggarakan pemilu dan hasilnya tidak pernah memuaskan. Setiap kali hasil pemilu tidak diakui oleh militer dan raja. Akhirnya dipilih perdana menteri yang tidak dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh militer. Di Filipina tahun 2004, bocor akhirnya percakapan antara presiden dengan ketua KPU. Disitu dia berdiskusi tentang hasil pemilu. Dia bilang saya mau menang dengan marjin 1 juta. Ketua KPU-nya bilang, "siap ibu". Kita tahu militer di Filipina pada tahun 2004 sangat membantu Arroyo untuk menang. Apalagi kalau kita melihat Singapura, Malaysia, apalagi Burma. Jadi kalau dibandingkan secara regional, Indonesia itu memang luar biasa berhasilnya. Cuma tahun 2009, menurun kualitasnya. Mungkin ke depan tahun 2014 kita lebih lagi memperhatikan kualitas pemilu. Karena pada tahun 2009, kita semua bersalah, karena 1999-2004 berjalan lancar, jadi kita tidak membantu lagi. Jadi masih ada banyak kekurangan apakah itu pendaftaran pemilih, sistem komputer untuk data penduduk, segala macam yang masih harus diperhatikan dengan baik.

Karena menurut saya, ada satu hal yang menyelamatkan Indonesia pada tahun 2009, dan itu adalah perbedaan angka antara Yudhoyono dan Megawati begitu besar, 30%. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa Yudhoyono yang menang. Tetapi coba bayangkan kalau perbedaan itu

cuma 3%, saya pikir tidak mungkin Megawati akan menerima hasil pemilu dan dia akan menggugat sampai selesai dan akan menggerakkan pendukungnya di jalanan. Karena banyak sekali dipertaruhkan dalam pemilu. Tetapi dengan hasil seperti itu 30%, Megawati bilang ya sudahlah, kalau pun salah sedikit saya tidak ada harapan untuk menang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau marginnya lebih kecil seperti yang terjadi di Kenya tahun 2007, Aburico (?) 2010. Kalau pada tahun 2014 perbedaan antara yang pertama dan kedua begitu kecil, sistem pemilu di Indonesia bisa *collapse*. Kita semua harus memperhatikan itu, dan harus meningkatkan investasi.

Saya masih ingat tahun 2009, Pak Yusuf Kalla bilang kita harus hemat, buat apa beli komputer baru. Pokoknya anggaran dikurangi, hemat, hemat, hemat. Kalau mau menjalankan pemilu yang bagus dan berkualitas, investasinya juga harus sesuai.

Soal *development*, saya sebenarnya bukan ahli dalam bidang itu. Bagaimana bisa menciptakan *home-grown development*? Sebenarnya kalau dilihat dari segi pendanaan asing, saya cukup curiga dengan konsep itu juga. Karena memang sekarang menjadi paradigma terbaru dalam *Paris Declaration, Jakarta Commitment*. Jadi ya sudah, kita mengikuti saja agenda pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Mau apa saja, kita menyesuaikan diri. Saya merasa ini jalan yang kurang menguntungkan karena masih banyak yang di luar bidang pemerintahan yang harus diperbaiki. Misalnya, untuk LSM dan NGO untuk pengawasan pemilu, LSM dan NGO lah yang harus diperkuat dan bukannya *home-grown development* yang malah ditawarkan oleh pemerintah.

Bahwa Indonesia harus menemukan formula bahwa pembangunan tidak tergantung pada dana luar, itu iya. Tetapi tidak berarti semua pendana asing harus mengikuti Indonesia sebagai negara yang menentukan agenda pembangunan tersebut. Ini mungkin cukup kontroversial, di kalangan *development* juga dibahas; apakah kita mencoba untuk menentukan sendiri strateginya, ataukah kita lebih mengikuti konsep *home-grown development*; apakah *home-grown development* ditetapkan oleh pemerintah atau oleh LSM, itu juga masih menjadi pertanyaan besar.

Lima poin itu dulu dari saya. Saya harap kita bisa berdiskusi nantinya. Karena saya tidak menganggap ini sebagai suatu kuliah atau makalah, saya lebih tertarik untuk berdiskusi dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu secara bebas supaya lebih dinamis. Terima kasih.

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Terima kasih Saudara Marcus. Saya ingin mengulang sedikit apa yang baru saja dibahas supaya bisa jadi pengantar untuk Mas Faisal.

Ada 5 isu yang diangkat oleh Saudara Marcus:

1. Hubungan diantara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.

Dengan bertolak dari ilmu politik, seperti dari Larry Diamond, dikatakan bahwa pemerintah yang tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, akan sulit untuk mendorong demokrasi. Tetapi Indonesia itu, menurut Marcus, agak unik; karena meskipun pemerintah tidak bisa mendorong suatu politik yang lebih efektif, tetapi, menurut survei, demokrasi cukup berjalan. Tidak ada orang yang ingin kembali kepada pemerintahan yang lebih otoriter.

2. Pendapatan perkapita dan demokrasi.

Banyak debat diantara para ahli mengenai ini. Pak Juwono menyebut angka 8.000 USD per kapita untuk ambang demokrasi. Sekarang baru 3.000; jadi apakah sekarang kita belum demokratis? Dibandingkan dengan Thailand yang pendapatannya 2 kali dari Indonesia keadaan demokrasinya lebih kacau dibanding keadaan demokrasi kita. Di samping juga, banyak negara-negara kaya di Timur Tengah, ternyata tidak demokratis. Jadi bagaimana menanggapi hal itu?

3. Aspirasi untuk kembali ke pemerintahan dengan gaya Soeharto, otoriter tetapi efektif. Menurut Marcus, dalam survei-survei terakhir, setidaknya 75% yang tetap mendukung demokrasi.

4. Pemilu dan *checks and balances*.

Apakah benar politisi kita lebih memperhatikan pemilu daripada memperhatikan *checks and balances*. Ada beberapa contoh yang diajukan Marcus, beberapa bupati yang sangat menekankan pelayanan publik, menang dalam persaingan dengan lawan-lawan mereka, bupati-bupati yang memberikan pelayanan kesehatan gratis, perhatian kepada orang-orang tua.

5. Kualitas pemilu.

Dikatakan bahwa kualitas pemilu 2009 menurun dan salah satu faktor yang membuat persaingan diantara kontestan menjadi tajam karena perbedaan suara yang diperoleh antara Megawati dan SBY itu besar sekali.

Kemudian juga ada diskusi mengenai *home-grown development*.

Sekarang saya persilahkan Mas Faisal (untuk melanjutkan sesi).

Faisal H. Basri, MA, Pembicara

Kalau kita lihat *set-back* reformasi 1998: sebenarnya itu merupakan reformasi di bidang pemerintahan, ekonomi dan politik. Saya rasa tidak ada negara yang memiliki pengalaman seperti ini. Saya ingat Profesor (?) dari Georgia mengatakan negara kamu luar biasa, karena biasanya akan *collapse* kalau tiga reformasi berjalan bersamaan. Jadi, memang terlalu banyak PR-nya, dan oleh karena itu kita tidak boleh mengharapkan hasil yang tiba-tiba lengkap dalam waktu yang relatif singkat. Itu yang pertama.

Kedua, mungkin dalam perjalanannya kita lupa bahwa ada hal-hal mendasar yang tidak disentuh. Dalam reformasi ekonomi; semua diserahkan kepada pasar, jadi sepertinya kita lupa bahwa dengan lebih banyak menyerahkan kepada pasar, maka kita membutuhkan peran negara yang lebih kuat, membutuhkan jaring-jaring pengaman pasar itu sendiri. Saya bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minggu lalu tentang pentingnya sistem jaminan sosial, yang diterapkan di Perancis, Jerman, Norwegia dan dimana-mana di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ibaratnya kita keping mata uang, hanya satu sisi saja yang kita terapkan. Liberasi pasar kita lakukan dengan tidak melakukan pengaman jaring-jaring pasar. Jadi, peran negara disitu hilang, kemudian sendi-sendi peran negara juga tidak cukup kuat.

Negara kian hari perannya makin tergerus. Teman-teman bisa lihat, negara seperti Indonesia, yang masih merangkak, yang masih membutuhkan sosok yang bisa menuntun anak-anak yang baru belajar jalan, tetapi tidak ada itu. Bayangkan peran *government spending* di dalam GDP, tidak mencapai 10%. Amerika Serikat yang cenderung libertarian besarnya 19%; peran negaranya jauh lebih besar dari Indonesia. Indonesia 9%, kurang dari 10%. Jadi yang bisa dilakukan oleh negara (Indonesia) relatif sangat terbatas.

(Sehubungan dengan) reformasi, tidak ada yang mau bayar ongkosnya. Semua orang lebih senang jadi *free rider*; maksud saya tidak mau bayar pajak. Mulai dari presiden; bayar pajaknya lebih kecil. Untuk diketahui saja, presiden itu membayar pajaknya lebih kecil dari saya. Jadi bagaimana negara mau dibangun kok bayar pajak tidak mau. Pada umumnya masyarakat enggan bayar pajak, barangkali karena tidak merasakan manfaat dari pajak. Tiap hari kebutuhan makin besar, dan pemerintah tidak bisa melayani kita. Jalan-jalan makin banyak yang rusak. Barangkali kalau kita bandingkan terkait keadaan jalan (?), *capital stock* kita turun karena jumlah modal yang kita bangun, yang kita tambahkan,

itu lebih besar kecil dari depresiasinya, dari penyusutannya. Ini yang membuat negara semakin tidak kita rasakan hasilnya. Kita tidak bisa membendung barang-barang ilegal. Misalnya, ikan lebih banyak dari Cina. Masih banyak yang bisa kita lakukan dibanding Cina yang penduduknya 1,5 milyar, lebih besar dibanding kita yang penduduknya hanya 300 juta. Kita harusnya bisa lebih melakukan penetrasi. Tetapi sekali lagi, negara tidak banyak berbuat. Tidak pernah ada standar nasional industri, tidak membenahi aparat kepolisian pantai, cukainya lemah, segala macam lemah. Ya jelas mereka (Cina) besar dan membesar. Kita tidak lagi bisa mengemban amanat UUD 1945. Tugas negara untuk menjaga tumpah darah Indonesia itupun tidak bisa lakukan.

Ketiga, negara menganggap jaminan sosial itu beban. Padahal itu bukan barang baru. Di negara manapun yang memiliki jaminan sosial, pertumbuhan ekonominya, untuk negara-negara yang selevel, saya kira lebih bagus dari kita. Misalnya Malaysia, Singapura. Jerman di Eropa, dengan jaminan sosialnya yang lebih bagus, kesejahteraannya lebih bagus dan lebih punya daya tahan. Sedangkan di kita dianggap beban, ongkos, resiko fiskal. Ada yang salah, yang belum kita lakukan, yaitu kita belum merumuskan peran negara apa, peran *society* apa. Karena hal itunya *jomplang*, maka terkesan kita masuk ke dalam kubangan yang tidak menentu. Sehingga kita cenderung menyalahkan, merencanakan kudeta, dewan revolusi dan sebagainya, yang saya sangat yakin itu bukanlah solusi untuk memimpin negeri ini.

Kemudian, kalau kita lihat, di *tax ratio* kita, peran negara turun, yang tercermin dari *tax ratio* yang turun juga. *Tax ratio* kita cuma 11% dan dalam waktu 5 tahun terakhir turun terus. Jadi, ekonomi tumbuh, tetapi pembayar pajaknya berkurang. Tapi mungkin juga karena ada permasalahan di dalam (kantor) perpajakan itu sendiri, seperti yang kita lihat ramai-ramai di televisi.

Oleh karena itu, reformasi dan demokrasi jalan di tempat. Karena apa? Karena itu tadi, karena birokrasi menjalankan peran yang dia tidak tau untuk apa. Contohnya sederhana: seluruh urusan sudah diserahkan kepada daerah, kecuali 5 hal, tetapi tidak ada pengurangan jumlah pegawai di departemen. Malah sekarang, di era reformasi ini, departemen menggemuk; jumlah eselon I meningkat luar biasa dengan tugas yang tidak jelas kecuali bikin seminar, simposium, workshop, evaluasi, koordinasi *team work* dan sebagainya. Seperti misalnya besok pagi saya disuruh evaluasi entah apa, yang saya tau itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Sebaliknya, ada cahaya-cahaya yang baik di daerah-daerah. Misalnya di Solo, ada bus tingkat turis, bus pakai rel, bisa dikelola

bupati tanpa konflik. Kemudian di Bubur Raya di Kalimantan Barat, di luar kota Pontianak. Ketika saya kesana, saya mengetahui bupati dan istrinya naik pesawat kelas ekonomi tanpa ada ajudan-ajudan. Hal itu makin banyak. Bupati masih muda, umur 42 tahun.

Jadi sebetulnya negeri ini kacau, dilihat dari proses otonomi daerah. Seluruh urusan diserahkan ke daerah, tetapi uang tidak. Otoritas untuk memungut uang itu sepenuhnya ada pada pusat. Oleh karena itu jangan-jangan setelah ada otonomi daerah, daerah semakin bergantung kepada pusat; untuk keuangan daerah. PAD, setelah otonomi daerah, terhadap total pendapatan daerah adalah turun, di level provinsi, kabupaten atau kota. Hal ini karena daerah dianggap tidak mampu, tidak handal, untuk mengelola keuangan. Padahal pusat-lah yang tidak mampu.

Bulan Oktober lalu, uang yang ada di brankas pemerintah itu ada 170 triliun tidak dibelanjakan dan 20% lebih anggaran itu dihabiskan pada bulan Desember. Itulah kelakuan pusat, tetapi daerah yang dibodoh-bodohi. Sehingga sebenarnya daerah itu tidak punya keleluasaan untuk mengembangkan dirinya karena tidak diberikan instrumen logistik yang memadai. Tidak satupun jenis pajak diserahkan kepada daerah. Yang benar saja! Saya empati dengan daerah-daerah, seperti misal di Aceh yang saya dengar hampir bangkrut karena memang kering sumber dananya. Kalau di kita PPn yang didaerahkan. Ada pajak limbah sawitlah, aneh-aneh. Kemudian ada retribusi bongkar muat. Jadi kalau saya punya percetakan di Tangerang, ada mobil box membawa cetakan saya ke Kota Tangerang maka saya wajib bayar. Padahal saya tidak bongkar muat, cuma numpang lewat. Tapi ya karena itu yang bisa dilakukan oleh daerah untuk *survive*. Oleh karena itulah, menurut saya tidak *fair* jika kita menyalahkan daerah, seolah-olah daerah itu sumber masalah untuk dunia usaha, untuk macam-macam. Padahal hanya dengan itulah mereka bisa melayani masyarakatnya dengan lebih baik. Nah ini yang barangkali kita anggap sebagai beban tambahan untuk dunia usaha.

Keempat, dari survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, masyarakat ditanya apakah lebih senang pelayanan publik atau merasa pelayanan publik lebih bagus setelah otonomi daerah. Yang paling terasa adalah pendidikan dan kesehatan, jauh lebih baik dan lebih murah. Kemudian perijinan adalah yang paling jelek. Tetapi yang membaik adalah polisi. Jadi semua membaik, tidak ada yang menurun pelayanan publik setelah otonomi daerah. Inilah yang dirasakan publik, tidak hanya di Jakarta tetapi di daerah-daerah lain.

Yang terakhir, saya sekedar ingin menambahkan saja tentang: kok di Indonesia *growth*-nya jalan terus, walau pemerintahannya sambil lalu. Di sektor ekonomi, kontribusi belanja masyarakat adalah 64%. Investasi 26%. Peran negara 9%. Sementara ekspor dan impor, ekspor minus impor kira-kira adalah 1%. Totalnya adalah 100%. Jadi apapun, masyarakat akan terus belanja kok. Negara mau kayak apapun, investornya tetap *invest*. Dua poin ini (kontribusi belanja masyarakat dan investasi), sebagai roda ekonomi, totalnya 90%. Roda ekonominya ya jalan, sepanjang tidak ada gangguan berarti dari belanja masyarakat dan investasi.

Mengapa belanja masyarakat naik, padahal 50 juta orang, sepanjang 2003 sampai 2010, yang sudah keluar dari kemiskinan, yang pengeluaran perkapitanya per harinya 2 USD sampai 20 USD -- yang saya sebut sebagai *middle strata*, kalau Bank Dunia atau UNDP menyebutnya *middle class*. Bang Ignas pasti tidak setuju menggunakan *middle class* karena ada kriteria-kriteria lain sehingga kita bisa menyebut *middle class*. Ini sekedar stratifikasi masyarakat berdasarkan pengeluaran per orang per hari dari 2 USD sampai 20 USD. Nah, yang terbanyak, sekitar 36%, adalah yang 2 USD sampai 4 USD. Tetapi pertumbuhan yang pesat adalah 4 USD sampai 6 USD dan 6 USD sampai 10 USD. Inilah yang makin lama makin membuat makin masyarakat makin kritis kalau pelayanan publiknya tidak jalan. Oleh karena itu, masyarakatlah yang akan *demand*, seperti misalnya masyarakat Jakarta dengan kesadaran untuk membangun Jakarta yang lebih baik, itu muncul dari kalangan kelas menengah, 6 USD sampai 10 USD.

Tetapi, biar bagaimanapun pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tergolong rendah. Di Asia Timur, Vietnam, Taiwan, Thailand, semua sudah ada di atas kita. Karena apa, karena kita ada gangguan di segi peran negara. Tetapi sepanjang negara tidak menampakkan gangguannya, ini akan jalan terus, walau memang tidak karuan. Mobil bertambah, tambah macet, terus nanti dibatasi truk, dibatasi mobil, dan bukannya kesadaran untuk memperbanyak jalan dari pajak mobil.

Oleh karena itulah, menurut saya yang terakhir, dibutuhkan satu kesadaran baru pada kita untuk memperkuat proses transisi demokrasi lewat penguatan kelembagaan. Misalnya ada Perda di Jakarta yang masyarakat, setidaknya 30% pajak kendaraan bermotor didedikasikan untuk membangun jalan atau memperbaiki jalan dan 20%-nya untuk transportasi publik. Ini yang mungkin harus diusahakan lewat kontrak-kontrak politik waktu pilkada nanti, sehingga keluar Perda-Perda yang tidak membuka ruang bagi gubernur, bupati atau walikota untuk

memberikan cek kosong. Dengan begitu, layanan publik akan semakin baik.

Demikian Bang Ignas. Terima kasih.

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Terima kasih kepada Mas Faisal. Jadi tadi Anda dengar ada beberapa butir yang sangat menarik tetapi juga kontroversial.

Liberalisasi tidak disertai dengan jaring pengaman pasar. Bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pertumbuhan pajak yang menurun. Bahwa desentralisasi ke daerah-daerah tidak disertai dengan instrumen-instrumen logistik karena seluruh hak keuangan masih ada di pusat. Kemudian, bahwa pertumbuhan di Indonesia itu jalan, tetapi dibandingkan dengan seluruh kawasan di Timur ini paling rendah. Apalagi pertumbuhan jalan misalnya, atau perbaikan sektor-sektor riil belum terlalu kelihatan. Itu barangkali beberapa poin yang menarik dari presentasi Mas Faisal.

Kita mempunyai waktu 1 jam lebih sedikit untuk berdiskusi. Saya minta supaya yang berbicara untuk menyebutkan nama dan afiliasi dan supaya teman-teman lain dapat giliran untuk mengemukakan pendapat, pertanyaan dan komentar untuk dibikin sesingkat-singkatnya. Silahkan.

SESI TANYA JAWAB

Paskal, Peserta

Pertama-tama saya mau menanggapi. Setelah begitu lama reformasi di Indonesia, kenapa demokrasi di Indonesia belum *deliver* dan masih *stuck* di urutan ke-50 dari index yang tadi disebutkan. Saya menangkap itu karena ada desain yang kurang benar dari pemerintah terhadap pegawainya sendiri. Misalnya gaji yang sangat rendah dari pegawai negeri. Jangankan pegawai negeri yang baru masuk, tetapi bahkan saya punya seorang dosen yang saat ini menjadi staf ahli presiden, dan dia pernah mengeluh di kampus waktu itu karena gajinya sebagai staf ahli lebih rendah daripada gaji sebagai Ketua Departemen Politik. Nah ini adalah mengenai insentif, seorang diberikan tanggung jawab yang begitu besar tetapi gajinya kecil, tetapi diberikan kompensasi selama beberapa tahun misalnya menjadi komisaris di BUMN. Ini adalah insentif yang aneh menurut saya. Ini membuat demokrasi di Indonesia yang *politicking*, karena masing-masing orang memikirkan nasibnya sendiri. Ini berbeda dengan demokrasi di Amerika Serikat misalnya, yang warga negaranya

berpikir bahwa sebagai warga negara Amerika kita harus mulai berkompetisi dengan Cina.

Yang kedua menurut saya sebabnya adalah budaya politik. Misalnya kita lihat DPR. Ini menurut saya mandek karena budaya musyawarah untuk mufakat. Voting jarang sekali dilakukan, dan untuk menyelesaikan masalah lebih banyak melalui *deal-deal* di belakang pintu. Ini adalah budaya yang menjadi hambatan untuk demokrasi.

Kedua saya ingin bertanya kepada Marcus. Tadi Marcus menyebutkan tahun 2009 kualitas pemilu di Indonesia menurun karena bantuan asingnya mungkin menurun juga. Tetapi sebenarnya bagaimana sikap pemerintah terhadap bantuan asing yang sekarang? Kita butuh uang, tetapi apakah masyarakat internasional lebih memilih menyalurkan uangnya ke daerah konflik, seperti Afganistan atau Irak. Tetapi UNDP (?) dikeluarkan dari parlemen, atau oleh Marzuki Ali. Sebenarnya apa yang kita inginkan? Demikian. Terima kasih.

Adi (Seputar Indonesia), Peserta

Saya coba merangkum apa yang dikatakan Marcus tadi soal pemilu. Menurut Marcus, pemilu merupakan salah satu masalah utama bagi Indonesia yang sedang menuju transisi demokrasi. Saya melihat di daerah, ini berhubungan juga masalah efektifitas pemerintah daerah. Saya sepakat dengan Bang Faisal bahwa daerah masih dikooptasi, dipengaruhi oleh pusat. Tetapi daerah juga menjadi tidak jelas keberadaannya adalah karena tidak memiliki eksistensi dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi, daerah sendiri juga tidak benar dalam mengelola pemerintahannya, itu juga membuka praktek-praktek yang tidak baik, dimana investor tidak memberikan kontribusi kepada daerahnya.

Yang menarik dari sini ternyata ada persoalan partai politik. Partai-partai politik yang menjadi sentral pembangunan di Indonesia seharusnya memberikan kontribusi untuk negara. Pemerintah kita juga berasal dari partai politik. Pemilu juga suatu kompetisi dari partai-partai politik untuk meraih kekuasaan, dimana mereka membangun teritorial daerahnya berdasarkan perspektif yang mereka punya.

Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Saudara Marcus dari soal pemilu tadi terhadap konfigurasi partai politik yang ada di Indonesia. Karena semua yang akan terjadi di demokrasi, di lokal sekalipun, itu

merupakan representasi dari partai politik itu sendiri. Mereka menjadi pemimpin berdasarkan pemilu. Semua berawal dari pemilu dan pemilu diikuti oleh partai-partai politik.

Dr. Marcus Mietzner, Pembicara

Baik, tetapi saya tidak mengerti pertanyaannya.

Adi (Seputar Indonesia), Peserta

Partai politik, dalam kaitannya dengan pemilu, bagaimana mengeksplorasinya dengan pemilu? Saya melihat, pemilu merupakan bagian dari partai politik. Partai politik memiliki kekuasaan di daerah dalam hubungan bagaimana daerah membangun daerahnya; efektifitas pemerintahannya. Daerah juga hadir karena proses pemilu. Orang-orang yang ikut pemilu adalah orang-orang partai politik yang menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

Irfan R Hutagalung (?) (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), Peserta

Kalau kita ingin mengetahui atau mengukur demokrasi, ada beberapa kriteria. Kriteria yang dibicarakan disini banyak dipakai orang. Misalnya kultur dari efektifitas pemerintahannya dan sebagainya. Tetapi bisakah kita melihat bahwa jika mau membandingkan demokrasi yang dilakukan di Amerika Utara dengan demokrasi yang baru tumbuh, seperti di negara-negara Asia Timur atau Asia Tenggara, dapatkan kita melihat atau menggambarkan demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia, itu adalah pola perilaku dari oligarki. Nah, apakah itu bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat apakah oligarki di negara-negara berkembang ini menjadi tidak dapat ditaklukkan oleh hukum misalnya, ketimbang oligarki yang ada di negara-negara Eropa.

Otto (Elsam), Peserta

Dari paparan Pak Marcus tadi, dari sekian pendapat dan tanggapan, yang saya pahami, secara umum, masyarakat Indonesia mendukung sistem demokrasi, baik elitnya maupun rakyatnya. Yang ingin saya ketahui, bagaimana pendapat Pak Marcus mengapa baik elit maupun rakyat mendukung sistem demokrasi? Selama ini yang menolak demokrasi adalah elit tetapi sebagaimana dicontohkan tadi, dalam konteks Indonesia, elit bisa diuntungkan dengan atau bisa mengambil keuntungan dari sistem demokrasi. Saya kira demokrasi yang didominasi oleh elit akan sulit untuk menghasilkan suatu yang bermakna. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana mengatasi hal seperti itu?

Kemudian pertanyaan untuk Pak Faisal. Pak Faisal tadi mengatakan bahwa dalam konteks ekonomi daerah, walaupun cenderung masih buruk, tetapi dalam banyak hal sudah mulai membaik. Saya ingin tahu lebih lanjut, bagaimana dengan soal primordialisme, misalnya calon-calon putra daerah, apakah dalam konteks otonomi daerah hal itu sudah mulai membaik.

Huda (Sekolah Demokrasi Tangerang), Peserta

Yang ingin saya sampaikan adalah terkait kebijakan publik. Jadi kalau tema malam ini adalah menurunnya demokrasi dan minimnya pelayanan publik, saya ingin mencoba masuk lebih dalam. Saya melihat, dalam proses pelayanan publik, baik birokrasi di daerah maupun pusat, lebih bersifat sebagai seorang kontraktor, melihat segala sesuatunya sebagai proyek. Pengalaman kami di daerah, dalam pelayanan publik, jalan dan pembangunan infrastruktur misalnya, dalam proses tender yang dilakukan, prosedur tender itu hanya "seolah-olah". Banyak yang diselesaikan di belakang. Akibatnya, anggaran untuk infrastruktur yang seharusnya besar, dipangkas untuk *deal-deal* antara pengusaha, legislatif, eksekutif maupun birokrasi. Potongannya sangat besar. Pengalaman kita di Tangerang, kebetulan saya memiliki beberapa teman yang biasa bermain di proyek-proyek pemerintah daerah, dia harus menyetorkan 15% sampai 30% hanya untuk mendapatkan sebuah proyek. Tentunya ini akan berdampak pada kualitas infrastuktur yang akan dibangun dan kualitas konstruksi bangunan. Dampaknya kemudian, yang seharusnya bangunan bisa bertahan 5 - 10 tahun, karena anggarannya dipangkas, menyebabkan kualitasnya menurun. Akibatnya, pada tahun berikutnya pemerintah harus menganggarkan ulang untuk infrastuktur tersebut.

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Jadi Anda tidak punya pertanyaan, hanya memberikan tanggapan ya. Kita akan meminta pembicara untuk menjawab 5 pertanyaan tadi.

Faisal H. Basri, MA, Pembicara

Tidak ada satu kajian yang pernah saya baca yang membahas hubungan antara otonomi daerah dengan primordialisme. Ini karena elit-elit di daerah lebih tipis dibanding di nasional. Tentu saja akan banyak sekali praktek-praktek primordialisme akan berbaur dengan apa yang Bung Huda sampaikan tadi.

Di Banten, di Sulawesi Selatan misalnya, yang terpilih itu-itu juga. Di beberapa daerah suami istri maju Pilkada, satu calon walikota dan satunya lagi calon wakil walikota. Kandidat independen di Kota Balikpapan, anaknya, kemudian suaminya maju jadi calon bupati. Ini menurut saya merupakan perwujudan konteks nasional, yang masih sarat ikatan-ikatan primordialisme. Kalau saya lihat dari perspektif ekonomi, itu karena lapisan kelas menengahnya masih sangat tipis. Kelas menengah -- yang punya andil, ideologi progress, rasa keberpihakan, tidak hanya manut kalau dikasih uang, mereka punya sikap, dan mau mengatakan sesuatu yang dianggap salah -- ini belum muncul. Segera setelah lapisan strata menengah 4 USD sampai 10 USD dan 10 USD sampai 20 USD meningkat lebih kencang, maka tuntutan itu akan lebih besar dan akses mereka kepada logistik juga besar. Sehingga, akses mereka ke politik juga akan makin besar.

Ini bukan cerita diri sendiri, tetapi semakin meneguhkan dengan teman-teman sekalian. Waktu pilkada DKI kemarin misalnya, belum ada calon independen. Sarwono, Agum Gumelar, dan lainnya saya lupa, Foke dan saya maju lewat PDI Perjuangan. Saya punya apa, tidak punya rumah kecuali satu, tidak punya mobil kecuali dua, tetapi tidak ada mobil atau apapun yang saya jual. Tetapi saya dalam waktu sekejap bisa kumpulkan 2 milyar. Ini belum pilkada, baru persiapannya saja. Karena apa? Karena itu wujud kepedulian dari kelas menengah yang menghendaki adanya perubahan. Ya sayangnya saya tidak terpilih. Kalau terpilih, kita udah ada metodenya, bagaimana untuk *fund raising*, bagaimana menghindari bandar. Saya tidak mau bandar, walau ada yang mau bandari saya. Saya optimis, *growing middle strata* ini meningkat terus siapapun presidennya, apapun partai politiknya. Dan suatu saat saya merasa yakin akan muncul kerinduan akan satu pengikat ideologis. Apa sih yang membedakan, misalnya saya masuk Gerindra, teman saya masuk Golkar dan lainnya masuk PKS, PAN atau Demokrat. Kita ingin ada pembeda, ada basis-basis sebagai identifikasi diri. Sehingga lambat laun, ikatan primordialnya, menjadi ikatan ideologis. Walaupun senior-senior saya bilang: "Faisal hari gini masih ngomongin ideologi. Gak relevan". Padahal dulu dia sangat ideologis. Sekarang dia sudah tidak percaya pada dirinya, sudah tidak percaya pada garis perjuangannya yang dulu. Tetapi saya masih percaya.

Kemudian menjawab pertanyaan Mas Huda, ini tercermin dari hampir semua kasus di KPPU adalah tentang tender di daerah. Tetapi kalau kita ingin melihat konteksnya, maka akan kelihatan penyebabnya adalah lemahnya aturan di tingkat pusat. Contohnya adalah UU Minerba. UU Minerba mengatakan bahwa pertambangan batu bara boleh dimiliki oleh bukan badan usaha. Jadi pribadi-pribadi boleh (memiliki). Coba bayangkan, ini yang bikin adalah DPR dan pemerintah. (Katanya)

tujuannya untuk pemerataan. Tapi ini adalah sumber masalah di daerah jadi bacaan politik; ada yang minta hak walau tidak punya uang, model-model semacam ini. Saya masih yakin, tugas negara, tugas DPR, dan tugas DPRD adalah untuk membuat peraturan yang memungkinkan seperti main tinju. Jadi kalau mau tonjok-tonjokkan silahkan, tetapi hanya di dalam ring tinju itu. Institusi itu tugasnya adalah untuk memperkuat ring tinju itu. Ring ini yang tidak bisa kita hasilkan. Mau DPR punya gedung baru, tapi DPR hanya membuat 20 undang-undang dalam setahun dan kualitasnya super buruk, hampir semua undang-undang buruk. Buktinya apa? Banyak yang di-*challenge* di Mahkamah Konstitusi kemudian rontok. Sampai kapan mau terus seperti ini?

Ada satu yang *missing* dalam proses ini, yakni dalam proses pembuatan undang-undang. Saya bekerja sebagai pegawai negeri dari tahun 1985 sampai sekarang dan gaji saya 4,1 juta (rupiah). Tidak bisa membayar anak sekolah. Akhirnya jadi harus di-*create* suatu ruang yang memungkinkan pegawai negeri punya uang lebih banyak di luar gajinya, entah halal atau tidak itu urusan nanti, seperti tadi dikatakan menjadi komisaris dan sebagainya. Herannya ada penentangan. Jaman Sri Mulyani dilarang, tetapi sekarang dibolehkan lagi.

Satu hal lagi adalah konsistensi di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang saya prihatin misalnya katakan kita menginginkan peningkatan gaji, yang diutamakan peningkatan gaji adalah menteri, atasan dan pejabat yang lebih tinggi. Kesannya jadi lebih mementingkan diri sendiri ketimbang membenarkan sistem secara keseluruhan. Saya kira itu saja.

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Sebelum ke Marcus, saya meminta Mas Faisal untuk lebih menjelaskan secara detail, sebetulnya apa akibat dari kemunculan kelas menengah yang semakin kuat ini terhadap penguatan demokrasi.

Faisal H. Basri, MA, Pembicara

Seperti itu tadi, misalnya dalam proses pilkada, ada saweran dan sawerannya lumayan. Kalau semua miskin tidak akan ada yang nyawer. Jadi tentang pembiayaan.

Kemudian dalam penyikapan. Misalnya saya sekali datang dalam *Save Jakarta*, saya tidak mengira, proses kristalisasi kesadaran kelas menengah yang merasa terancam hidupnya kalau gubernurnya begini terus. Mereka (kelas menengah) merasa harus ada perubahan di Jakarta ini. Jadi, kelas

menengah yang semakin kuat akan mendesak tuntutan perubahan yang lebih keras. Yang (justru) agak melemah adalah buruh. Karena industrinya semakin lama semakin melorot. Makin sedikit orang bekerja di industri manufaktur. Jadi tidak ada ancaman yang cukup serius dari sektor ini karena industrinya *memble*, dihantam oleh Cina, dihantam dari mana-mana. Ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Harus diatasi agar tidak timbul kelas menengah yang banyak berasal dari sektor jasa, yang tidak bisa berpolitik dengan leluasa karena kalau disakitin tidak punya jaminan kesehatan, tidak punya jaminan masa depan karena tidak punya pensiun. Kelas menengah tidak mungkin bersuara, dia berjibaku dari hari ke hari dengan hidupnya, yang tidak memungkinkan dia untuk memiliki ruang di otaknya untuk memikirkan nasib masyarakat dan nasib bangsanya. Terima kasih.

Dr. Marcus Mietzner, Pembicara

Ada beberapa pertanyaan. Dari Paskal, soal gaji. Itu memang salah satu hal yang mendasar dalam reformasi birokrasi. Rekan saya dari 10 tahun yang lalu selalu menulis tentang 'keharusan untuk meningkatkan gaji birokrasi. Saya kira hal itu cukup beralasan karena kalau Anda lihat lembaga-lembaga yang cukup berhasil dalam proses reformasi yang berhasil adalah lembaga-lembaga yang petugasnya memiliki gaji yang lebih tinggi, agar mereka misalnya tidak terjebak ke dalam kondisi-kondisi (yang tidak diinginkan) seperti hakim-hakim di Mahkamah Agung dan kemudian KPK mereka diberi gaji yang lebih tinggi agar dalam menjalankan tugasnya mereka tidak tercemar. Juga Densus 88, jika digaji seperti polisi biasa maka tidak akan berhasil. Jadi sebenarnya dari dulu hal ini sudah diakui oleh ahli-ahli demokrasi di seluruh dunia, tetapi tidak dijalankan.

Seperti misal yang Pak Faisal bilang, SBY misalnya bayar pajak lebih rendah daripada Pak Faisal, alasannya karena secara resmi gaji dia (presiden) rendah. Katakanlah 25.000 USD setahun. Kalau di Singapura, 3 juta (USD) setahun. Jadi itu harus disesuaikan dari atas sampai ke bawah. Jadi bagaimana agar pegawai negeri bisa hidup dari gaji tanpa kegiatan luar yang kita definisikan atau kita anggap sebagai korupsi. Kalau di Indonesia, terkadang pembenaran untuk korupsi adalah korupsi dilakukan untuk tambahan bagi anak-anak. Solusi jangka panjangnya adalah perbaikan gaji. Tadi Pak Faisal bilang Oktober 2010 170 triliun anggaran tidak digunakan, tetapi pada saat yang sama negara bilang bahwa untuk gaji pegawai negeri, negara tidak bisa membayar lebih dari itu. Saya tidak percaya. Kalau memang sisanya setinggi itu dan setiap tahun terulang seperti itu, sebenarnya ada dana untuk menjalankan itu. Tetapi ya seperti tadi, saya curiga bahwa, seperti Pak Faisal bilang, ada desain untuk

mempertahankan sistem itu supaya kegiatan-kegiatan diluar jabatan resmi bisa dilegalisasikan.

Ambil contoh militer misalnya. Militer dari dulu bilang anggaran militer tidak cukup. Negara bilang: "Oke, tetapi kita tidak bisa kasih lebih". Implikasinya mereka cari di luar meskipun melanggar undang-undang yang ada. Jelas sekali UU TNI mengatur anggaran TNI dibiayai oleh anggaran negara. Tidak ada di luar itu. Tetapi karena dari dulu militer bilang kita seharusnya dikasih segini, tetapi negara cuma bisa kasih 30% dari itu, ya sisanya kita cari di luar. Hal yang sama terjadi di sistem birokrasi. Jadi saya curiga memang ada kepentingan bersama dalam elit politik; sistem itu dipertahankan. Jadi walaupun gajinya kecil, tetapi bisa dicari lebih diluar, yang tidak dihitung dan tidak dibukukan.

Soal bantuan asing, kembali ke yang saya katakan, sekarang suasana sudah berubah dibanding 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu masih sangat terbuka, masih sangat menerima. Saat ini tingkat nasionalisme di dalam elit-elit politik birokrasi begitu tinggi; bantuan asing dicurigai sebagai intervensi. Maka, secara internasional muncul *Paris Declaration* 2005 kemudian *Jakarta Commitment* 2007 kalau tidak salah. Intinya sama, pokoknya saat ini bukan asing yang menentukan sendiri bantuannya tetapi harus disesuaikan dengan agenda pemerintah Indonesia. Dalam konteks pemilu 2009, ya memang seperti itu; bahwa ada kecurigaan terjadi intervensi. Kasus *quick count* dianggap intelejen (?). Jadi Anda benar, bahwa walau harus ditingkatkan komitmen asing terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tetapi memang ada masalah dari pihak Indonesianya itu sendiri dan itu harus diatasi. Sistem komputer misalnya, gampang bisa dibantu misalnya oleh Jerman dengan bekerja sama dengan kementerian dalam negeri untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk registrasi berdasarkan sistem komputer. Di situ tidak ada intervensi asing sama sekali, tetapi tetap dicurigai. Kemudian ada kasus terbaru di DPR yang sudah 11 tahun ada di situ tetapi baru Marzuki Ali bilang "Loh kok itu diberikan ke asing - kita mau meraih kembali yang sebelumnya diserahkan ke asing". Itu kan lucu sekali. Tetapi itu menunjukkan bahwa benar-benar terjadi perubahan dan sikap Indonesia terhadap bantuan asing.

Soal pemilu menjadi permainan politik, itu memang benar. Tadi saya katakan, terjadi pengurangan bantuan asing dan pengurangan anggaran dari Indonesia sendiri. Jusuf Kalla sendiri yang waktu itu memimpin usaha untuk mengurangi biaya pemilu. Yang dia (Jusuf Kalla) sebutkan sebagai efisiensi sebenarnya ada pengurangan kualitas. Bukan cuma itu, dikurangi kewenangan KPU, itu juga permainan politik dan partai politik.

Pengurangan kewenangan KPU untuk melakukan intervensi kalau diperlukan, yang mana itu diatur oleh undang-undang, dan undang-undang dibuat oleh partai politik. Akhirnya mereka (partai politik) *complain* bahwa KPU tidak siap, meskipun undang-undang mereka yang bikin.

Tahun 2004, KPU masih mempunyai kewenangan untuk bergerak cepat, tetapi di tahun 2009, berdasarkan undang-undang, KPU tidak bisa lagi. Contoh kedua, KPU dikritik habis-habisan, tetapi yang memilih siapa? Itu kan pemerintah dan DPR. Padahal banyak (anggota KPU) yang lama yang bagus, yang mengerti soal pemilu, tetapi mereka semua dibuang. Kemudian diambil orang-orang kampung yang pernah menyelenggarakan pilkada tingkat kabupaten, tetapi tiba-tiba diminta untuk menyelenggarakan pemilu yang merupakan salah satu yang paling besar di dunia. KPU yang saat ini bertugas merupakan hasil pemilihan dari presiden dan DPR. Tetapi kemudian mereka di-*complain* karena tidak mengerti persoalannya. Semestinya begitu baca nama, jelas kita harusnya tahu bahwa mereka tidak mampu. Hal itu menjelaskan bahwa memang ada permainan, ada kepentingan dari partai politik untuk membuat pemilu 2009 tidak efektif. Hal ini kenapa? Kita lihat karena mereka (partai politik) ingin mendapatkan kontrol kembali atas KPU. Mereka bilang (partai politik) 2009 KPU jelek, maka mereka minta untuk memberikan kembali kewenangan penyelenggaraan pemilu ke partai politik. Agendanya jelas, undang-undangnya diubah, sekarang anggota partai politik, begitu dia keluar dari anggota partai bisa menjadi anggota KPU. Nanti akan Anda lihat, banyak petugas dari Golkar atau dari partai manapun, keluar dari partainya untuk bertugas menjadi KPU. Disitulah agendanya.

Soal oligarki, itu sangat penting. Pertanyaannya, yang juga harus dipikirkan, penyebabnya apa? Penyebabnya bukan hanya oligarki yang secara agresif coba mengontrol sistem politik di Indonesia, saya rasa juga LSM dan masyarakat biasa harus memikirkan apakah mereka memberikan kontribusi terhadap penguatan oligarki tersebut. Maksud saya adalah, masyarakat tidak mengerti bahwa demokrasi itu mahal. Kalau mau ikut dalam pemilu, kalau mau menjalankan partai, kalau mau menjadi calon dalam pemilu, itu sangat mahal -- tetapi masyarakat tidak mau membiayai kegiatan tersebut. Seperti di negara-negara barat, Jerman atau Australia atau dimanapun, negara punya peran dalam membiayai kampanye politik. Partai diberikan dana oleh negara dan dana tersebut diberikan ke calon supaya dia (calon) nanti bisa membiayai pencalonannya. Supaya dia tidak harus keliling cari sponsor, cari dari konglomerat hitam. Di Indonesia, setiap kali ada yang mau memberikan uang ke partai, masyarakat selalu protes; partai politik korup, tidak

mampu, lebih baik uangnya dikasih ke rakyat saja untuk membiayai rumah sakit dan macam-macam.

Sekarang misal tentang gedung DPR, menurut saya perdebatannya salah. Itu distraksi sebenarnya. Masih lebih banyak topik yang jauh lebih penting dibanding gedung DPR. Memang diperlukan gedung baru. Kita dari dulu mengatakan kalau mau menguatkan DPR harus tambah staf ahli. Di negara Amerika misalnya, setiap anggota DPR memiliki 20 staf ahli supaya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau di Indonesia berapa? Awalnya satu staf administrasi dan satu staf ahli. Sekarang, mau ditambah satu, sampai 2014 mau ditambah sampai lima -- dan itu diperlukan, dari segi apapun itu diperlukan. Kita mendukung hal itu. Sekarang mau ditambah, tentu butuh gedung baru, ternyata muncul perdebatan itu.

Juga contoh yang lain, mengenai perjalanan ke luar negeri. bukan itu intinya. Itu distraksi. Bukan itu sebenarnya intinya. Jauh lebih besar dari itu. Intinya adalah bahwa masyarakat Indonesia tidak mau membiayai politisi, dan itu salah. Harus dipikirkan suatu sistem pembiayaan politik, pendanaan partai politik, yang mereka mendapat pendanaan dari negara yang cukup untuk menjalankan kegiatan politik. Kalau itu tidak ada, jangan heran mereka cari dana dari konglomerat hitam, cari dana dari korupsi, cari dana dari pihak lain. Setiap kali gaji DPR mau dinaikkan, protes lagi LSM, jangan dinaikkan. Walaupun mereka (LSM) tidak tau bahwa begitu anggota DPR dapat gaji, hari itu langsung habis; 30% dikasih ke partai, sisanya dikasih ke cabang partai, di daerah pemilihan. Saya kadang ikut anggota DPR ke konstituennya, dibagi-bagi uangnya itu. Dibagi ke masyarakat, ke teman-teman, supaya mereka aman di daerah konstituennya. Dari gajinya tidak ada yang tersisa. Akhirnya mereka harus cari dari korupsi, dari sponsor dan segala macam.

LSM harus sadar bahwa tidak ada sistem demokrasi yang gratis, tidak ada sistem pemilihan yang berfungsi tanpa pendanaan yang layak. Jadi, jangan selalu teriak setiap mendengar ada pendanaan untuk kegiatan politik. Itu wajar dalam sistem demokrasi. Kalau masih mau melanjutkan sikap yang sama -- jangan satu sen pun ke partai politik -- ya jangan heran kalau terus akan seperti itu, oligarki justru akan berkembang dalam situasi ini. Oligarki berkembang dalam satu sistem dimana dia bisa menguasai semua lapangan politik karena tidak ada yang bisa bersaing. Aburizal Bakrie menjadi ketua Golkar ya karena itu, karena dia punya uang. Yang lain, karena tidak didanai oleh negara, tidak bisa menjalankan karir politik, menjadi tidak bisa bersaing. Jadi, Anda benar bahwa oligarki

menjadi masalah, tetapi ada kontribusi dari masyarakat, terutama masyarakat sipil, terhadap fenomena tersebut.

Yang terakhir, mengapa Indonesia, baik masyarakat dan elit, mendukung demokrasi? Saya tadi tidak bilang elit yang mendukung. Survei menyatakan 75% masyarakat yang melakukannya. Tentang elit, sebenarnya sangat menarik saat ini. Elit politik saat ini mencoba untuk mendapatkan kembali beberapa kewenangan mereka yang hilang dalam proses reformasi. Kita saat ini sebenarnya melihat ada semacam stagnansi demokrasi di Indonesia dan ada upaya dari elit untuk kembali (ke keadaan) misalnya di tahun 2001, 2002, dan 2003. Misalnya, mereka ingin mengembalikan sistem pilkada gubernur ke sistem yang lama. Mereka misalnya tidak suka gubernur dipilih langsung. Soal KPU dan KPK, disitu elit politik mencoba untuk mengurangi substansi demokrasi. Lucunya legitimasi untuk hal itu adalah referensi terhadap sikap masyarakat. Elit politik bilang: "Masyarakat tidak suka pilkada". Itu elit yang ngomong. Itu lucu sekali. Kalau ditanya rakyatnya, rakyatnya bilang: "Kita mau pilkada". 78% menyatakan memilih langsung. Tetapi elit politik bilang: "Kita kasihan dengan rakyat, dengan *money politics*, tidak efisien. Oleh karena itu kita ingin kembali ke sistem yang lama". Lucu sekali, pintar, cerdas, tetapi mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa melihat itu sebagai agenda politik yang mereka (elit politik) ciptakan sendiri. Jadi sebenarnya elit mau kembali ke sistem yang lama, dengan argumentasi bahwa masyarakat tidak suka lagi dengan demokrasi. Tetapi jika kita baca lagi survei yang ada, itu tidak betul. Jadi, selama masyarakat Indonesia secara umum masih mendukung demokrasi, saya optimis bahwa upaya-upaya elit itu bisa digagalkan. Dan selama ini berhasil, misalnya pilkada saya tidak yakin akan dikembalikan ke DPRD. Saat ini masih diperdebatkan, tetapi survei-nya cukup jelas bahwa masyarakat masih menginginkan gubernur dipilih langsung. Kalau sampai terjadi hal itu dikembalikan ke DPRD, itu suatu kemunduran demokrasi di Indonesia.

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Masih ada beberapa pertanyaan lagi, silahkan.

Rubi (Aman Indonesia), Peserta

Saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertama mengenai kelas menengah yang tadi dikemukakan oleh Pak Faisal. Sebenarnya momentum apa yang dibutuhkan oleh kelas menengah untuk kristalisasi interest mereka atas perubahan yang diinginkan untuk terjadi? Jika dilihat petanya sekarang, apakah momentum tersebut sedang ditunggu?

Yang kedua adalah peran *civil society* di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah *civil society* apakah cukup kuat untuk mengawal atau mengembalikan semangat reformasi di Indonesia yang sebenarnya sudah lama dikumandangkan sejak tahun 1998. Sebenarnya bagaimana kondisinya? Misalnya di kalangan LSM, kontestasi ideologi juga cukup kuat; antara teman-teman seharusnya mengarah kemana. Bagaimana peta sebenarnya?

Kemudian yang terakhir, posisi Indonesia tentang radikalisme, sejauh mana ini akan mengancam atau memperburuk situasi Indonesia, khususnya situasi ekonomi; dimana masyarakat sebenarnya melihat negara ambigu, di satu sisi sangat antusias untuk memburu terorisme, tetapi untuk kerukunan beragama mereka diam saja -- masyarakat melihat negara tidak terlalu signifikan dalam berbuat sesuatu. Dalam proses reformasi, apakah ini faktor yang benar-benar mengancam atautkah ada faktor lain di balik itu.

Mian (?), Peserta

Saya menjadi bingung karena banyak dan kompleksnya masalah di negara ini, tetapi pasti saat negara ini dibentuk, ada dasar yang melandasinya, makanya ada UUD. Pada saat UUD dibuat, seharusnya itu menjadi pokok pegangan untuk turunan pembuatan undang-undang yang ada di bawahnya, termasuk sampai ke tingkat daerah, kabupaten dan desa. Sekarang tentang penegakan hukum, pernah terjadi tidak anggota DPR atau DPRD memahami betul UUD itu. Karena misalnya dalam proses legalisasi undang-undang yang ada, banyak yang bertentangan dengan UUD. Misalnya tentang pelayanan publik; bukankah kita harus mendasarkan pada UUD. Ada hal yang mendasar yang paling tidak harus dilaksanakan oleh negara, misalnya jaminan tentang kesehatan, pendidikan atau perumahan. Misalnya dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju demokrasinya, katakanlah Jerman. Di Jerman, misalnya siapapun penguasa, dari partai manapun, tetapi ada suatu kebijakan dasar yang tidak berubah, tetap dijalankan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bang Faisal. Dikatakan tadi belanja 64% di konsumsi. Saya jadi ingat waktu kecil mama saya menasehati saya untuk jangan berhutang -- malu katanya. Yang ingin saya pertanyakan, 64% itu uang mereka atau hutang? Sekarang banyak dan mudah sekali dari bank menawarkan kartu kredit. Misalnya saya lihat tukang ojek dekat rumah saya, dia lebih baik membeli pulsa untuk *handphone*-nya dibanding untuk makan. Dia tahan merokok cuma sebatang tanpa makan, asal bisa beli pulsa agar bisa telepon pacarnya. Saya khawatir ke depannya akan semakin banyak korban-korban *debt*

collector. Ini fenomena apa Bang? Saya agak ragu, walaupun yang tadi Abang sebutkan itu di kelas menengah, saya ragu itu benar-benar uang mereka atau kredit?

Anton (Demos), Peserta

Dengan fenomena Cikeusik dan seterusnya, kelihatan jalan untuk mencari kebenaran bukan lagi dengan jalan demokrasi, tetapi dengan jalan kekerasan. Mungkin ini tidak *general*, tetapi ada sekelompok orang yang melakukannya. Meskipun tidak *general*, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi ini; apakah dengan pendekatan ideologi, pemahaman, atautkah pendekatan ekonomi?

Berikutnya, sepertinya secara umum Marcus mengatakan bahwa demokrasi dengan kesejahteraan tidak ada hubungannya. Dikatakan bahwa Indonesia tetap mencintai demokrasi walaupun pemerintahnya tidak efektif dalam memberi pelayanan. Sebaliknya mayoritas tetap menginginkan demokrasi berjalan. Ini semua seakan-akan mengatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara demokrasi dengan kesejahteraan, tidak ada hubungan sebab akibat. Saya teringat pada kasus Timur Tengah, yang sekarang tengah membara itu dipicu oleh pembakaran diri seseorang di tengah-tengah problem kesejahteraan. Dari pengalaman Timur Tengah memberi kesan kepada saya, memberi pelajaran bahwa ada ekspektasi bahwa sistem apapun harus membawa kesejahteraan. Dan tadi dibilang bahwa kesejahteraan tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Nah ini saya jadi bingung. Kemudian apa ukurannya bahwa demokrasi tetap diharapkan meskipun tidak ada kesejahteraan, apakah ukurannya semata-mata tidak ada demo. Atautkah ada ukuran yang lain bagi masyarakat?

Kalau yang jadi riset kami di 6 kabupaten, adanya defisit ekonomi sosial, adanya kurang kesejahteraan itu disebabkan karena 2 hal: (1) pemerintah punya pemahaman yang berbeda; (2) bahwa negara memang tidak memiliki intensi untuk membangun kesejahteraan. Jadi riset kami mengatakan bahwa kesejahteraan tidak terjadi ini karena negara sendiri tidak ada intensi untuk membangun kesejahteraan. Jadi, mau ada atau tidak ada hubungannya antara demokrasi dengan kesejahteraan, yang pasti selama ini kesejahteraan tidak terjadi ketika negara sendiri tidak ada intensi untuk itu. Pertanyaan saya, bukankah demokrasi menjadi ada hubungannya dengan kesejahteraan, artinya peran negara sangat diharapkan.

Niswita Putri (Sekolah Demokrasi Tangerang), Peserta

Seperti yang Mbak Mian katakan, saya juga bingung dengan kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia. Reformasi bergulir, tetapi Bang Faisal bilang reformasi masih stagnan. Reformasi bergulir, ruang demokrasi terbuka, sebagian orang berpendapat akan ada kebebasan berbicara, kemudian ada otonomi daerah yang melahirkan raja kecil. Menurut Pak Marcus, dari hasil survei, yang menurut saya cukup mengejutkan bahwa 75% masyarakat Indonesia masih menginginkan demokrasi walau kesejahteraan tidak tercapai. Kebetulan saya juga suka terjun ke masyarakat, kemudian kita mengadakan *talk show* tentang pemungutan liar, dan mereka selalu bilang masih enak jaman Soeharto. Ini membuat saya miris mendengarnya sebagai penggiat demokrasi.

Pertanyaan saya cuma satu. Seperti Pak Ignas bilang, demokrasi memang tidak menjanjikan surga, tetapi mencegah neraka di dunia. Demokrasi tidak bisa menghilangkan kelaparan. Yang ingin saya tanyakan formulasi yang lebih tepatnya, demokrasi lebih besar dari apa sama dengan kesejahteraan. Ataukah sentralisme lebih besar dari apa sama dengan kesejahteraan. Rumus yang lebih tepat.

Oto (Elsam), Peserta

Saya ingin menanggapi jawaban Pak Marcus dan Pak Faisal atas pertanyaan saya sebelumnya. Yang pertama, sehubungan dengan elit yang bisa membalikkan kembali demokrasi ke tahun 2000-an. Apakah ini kecenderungan elit secara umum ataukah ini termasuk elit yang kalah dalam pilkada?

Yang kedua, soal kebutuhan DPR untuk staf ahli. Menurut Pak Marcus DPR membutuhkan staf ahli. Pertanyaannya adalah apakah mereka memang membutuhkan staf ahli, ataukah mereka belum merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan dan gagasan dari konstituennya. Apa ini yang kemudian membuat sulit untuk menerima apapun gagasan untuk gedung DPR baru. Bisa jadi, apa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, oleh mereka kemudian dialihfungsikan menjadi apa yang mereka mau, dan tidak untuk perbaikan demokrasi saat ini.

Kemudian untuk Pak Faisal, khususnya mengenai harapan terhadap kelas menengah untuk menjadi agen perubahan. Saya kira, kelas menengah majemuk, ada yang mendukung perubahan dan ada juga yang *pro status quo*. Untuk gerakan ini, dengan pendekatan kelas, apakah mungkin lintas kelas? Tetap ada dari kelas pengusaha, kelas menengah dan kelas bawah. Yang kedua untuk Pak Faisal, dalam konteks pilkada, bukan hanya kiasan,

tetapi saya kira peran kelas bawah sangat dibutuhkan. Agen perubahan bukan hanya kelas menengah, tetapi juga dimungkinkan lintas kelas.

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Silahkan Marcus duluan. Banyak sekali pertanyaan untuk Anda.

Dr. Marcus Mietzner, Pembicara

Yang pertama, yang diangkat lagi adalah hubungan antara efektivitas pemerintahan dengan demokrasi. Yang saya tadi bilang bukannya tidak ada hubungan mutlak, hubungan absolut diantara 2 faktor tadi. Jadi A tidak langsung menyebabkan B. Misalnya demokrasi di Eropa Barat, Belanda, Perancis, Inggris, bahwa demokrasi mereka bisa bertahan karena ekonominya kuat? Itu ya. Tetapi, misalnya kita lihat di Arab Saudi, pendapatan dan efektivitas pemerintahan bagus, tetapi tidak ada demokrasi. Jadi yang ingin saya katakan, jangan anggap negara kaya adalah sama dengan negara demokrasi. Hubungan logis, hubungan langsung itu tidak ada. Tetapi bahwa ada negara-negara kaya, dimana disana terdapat kemungkinan, prospek untuk menjadi demokrasi -- itu iya. Itu untuk klarifikasi saja.

Soal kesejahteraan dan survei; menarik kalau lihat secara detil survei-survei tersebut. Banyak orang ketika ditanya secara umum, apakah misalnya ekonominya bagus atau tidak, akan menjawab tidak puas. Tetapi begitu ditanya keadaan pribadi, LSI misalnya yang menanyakan itu; apakah keadaan anda secara pribadi, hari ini lebih baik dari pada satu tahun yang lalu. Banyak yang bilang iya, mayoritasnya bilang iya. Jadi, ada kecenderungan, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, ahli-ahli tahu itu bahwa semakin umum pertanyaannya semakin mungkin mereka mengekspresikan ketidakpuasan. Tetapi begitu ditanya secara konkret, mereka bilang ternyata sebenarnya tidak terlalu buruk.

Satu hal lain yang menarik dari survei LSI adalah soal inflasi; faktor yang sangat penting bagi orang untuk menjawab apakah ekonomi membaik atau memburuk. Itu secara ekonomis, saya bukan ahli ekonomi. Mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan itu secara lebih rinci. Justru kalau ekonomi sedang berjalan baik, inflasinya tinggi. Kan begitu. Kalau kita lihat tahun 2008, pertumbuhan ekonomi 6%, sangat bagus sebenarnya, secara regional juga. Tetapi karena inflasinya sangat tinggi waktu itu, popularitas SBY langsung anjlok. Karena orang Indonesia tidak tertarik dengan pertumbuhan ekonominya *per se*, tetapi mereka tertarik dengan dampaknya terhadap kehidupan pribadi. Dan yang mereka tau di lapangan adalah bahwa harga naik.

Yang menarik lain misalnya saya berdebat dengan ahli ekonomi di universitas saya, mereka tidak mengerti soal itu, mereka bilang: "Loh ini kan tumbuh 6% sampai 7%, mengapa orang sampai tidak puas?". Mereka harus baca survei-nya LSI; popularitasnya SBY selalu sesuai dengan naik turunnya inflasi. Selalu seperti itu. Jadi bukan pertumbuhan ekonominya, tetapi inflasinya. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, inflasi akan naik. Jadi harus dibaca betul surveinya. Semakin konkret, akan semakin menarik dan semakin kompleks. Rata-rata, saya merasa, kalau ditanya apakah Anda mau kembali ke Pak Harto atau tidak, mereka akan menjawab: "Ya, saya rindu Pak Harto". Tetapi kalau ditanya, dibandingkan hari ini dengan satu tahun yang lalu bagaimana? Mereka jawab sebenarnya lebih bagus. Yang Anda sebenarnya tidak suka adalah kalau harga naik. Tetapi kalau dijelaskan itu karena ekonominya sedang bertumbuh, mereka akan bingung. Dulu dengan Pak Harto, sebenarnya inflasinya juga tinggi. Saya masih ingat, di bawah Soeharto itu (inflasinya) 8%, 9%, 10%. Ada kecenderungan orang untuk melupakan itu. Nostalgia itu selalu melupakan yang buruk, menonjolkan yang positif. Jadi sekali lagi, Anda bingung dan kita semua bingung ketika membaca kompleksitas hal itu. Tetapi kalau Anda membaca, misalnya, survei LSI secara rinci, biasanya ada 30 sampai 40 halaman, maka Anda akan mengerti bagaimana sentimennya orang-orang Indonesia di lapangan. Sangat kompleks memang.

Soal staf ahli, sekali lagi ini sesuatu yang semua ahli penguatan parlemen sepakat bahwa yang diperlukan adalah staf ahli. Tadi disebutkan kualitasnya undang-undang buruk, tetapi mau bagaimana, tidak ada staf ahli. Kalau di Amerika 20 orang. Tolong dicari undang-undang apa saja di Kanada, di Perancis, dan segala macam, dikumpulkan semua hal yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Kualitasnya itu ada, karena ada staf yang baik. Di Indonesia, semua yang terlibat dalam bidang itu sepakat harus ditambah staf ahli, tidak bisa tidak. Saya kemarin heran juga karena ada perdebatan di *lawyers club* atau apa gitu, moderatornya juga tanya, buat apa staf ahli. DPR telah menjelaskan bahwa mereka mau membangun gedung untuk menampung semua staf ahli yang baru itu. Ditanya buat apa Anda membutuhkan staf ahli. Ya saya heran juga, itu sangat klise. Coba ditanya ahli parlemen, terutama yang terlibat dalam program-program penguatan parlemen, itu jawabannya (anggota parlemen butuh staf ahli). Saya juga sangat heran karena LSM sendiri sangat populis; mereka bilang jangan dikasih staf ahli. Bahkan ada yang bilang, dari partai politik, bahwa uang pembangunan gedung sebaiknya digunakan untuk uang pembebasan sandera di Somalia. Apa hubungannya? Itu saya sangat heran. Itu populis sekali, mereka pasti akan diberikan tepuk tangan oleh masyarakat di bawah karena itu

pendekatan yang populis sekali, walaupun dari segi pendekatan rasional itu tidak masuk akal.

Saya mencoba mengajak kita untuk rasional, untuk mengontrol parlemen. Kalau dibangun gedungnya, maka harus memakai KPK misalnya untuk pengawasan. Itu diperlukan. Tetapi jangan kalau setiap ada politisi meminta laptop atau apa saja, selalu dibilang: "Enggak, untuk apa kamu perlu itu?". Kalau dipikir rasional, kalau dia perlu sesuatu dan dia tidak mendapatkan itu dari negara, maka dia akan mengambilnya dari konglomerat hitam dan akhirnya dia tergantung pada donor eksternal. Hal itu yang kita bersama tidak inginkan. Terima kasih.

Faisal H. Basri, MA, Pembicara

Ini terkait tentang momentum apa yang bisa mengkristalisasi perubahan. Apakah isu-isu yang harus difokuskan. Penyatuan isu, justru itu yang sampai sekarang belum banyak muncul. Yang ada terlalu banyak sehingga *civil society* susah untuk memiliki konsensus. Agendanya macam-macam. Kalau dulu berhadap-hadapan dengan negara, sekarang berkoperasi dengan negara dan bisnis; *multi stakeholders, voluntary* inisiatif untuk membuka atau menghadirkan transparansi perusahaan-perusahaan tambang. Selama ini *concern* kita perusahaan tambang itu merampok negara, sama dengan penguasa. Sekarang sudah ada ketentuan, sudah ditandatangani, presiden sudah *declare*, sudah daftar di Norwegia, kita jadi anggota, jadi seluruh perusahaan tambang di Indonesia wajib melaporkan jumlah uang yang disetorkan kepada negara dan negara juga wajib untuk melaporkan ke publik berapa yang ia terima dari perusahaan tambang. Jadi tidak harus selalu ada ledakan. Kemudian saya, apakah dibayar oleh negara? Tidak satu sen pun dibayar oleh negara. *Civil society* yang membayar saya, kan saya jadi bangga. Saya juga tidak menyangka prosesnya damai. Saya memang tidak mengikuti prosesnya secara keseluruhan, tetapi saya melihat kita juga tidak terkooptasi oleh mereka. Saya lihat, mereka justru lebih banyak mendengarkan kita, karena kita juga memang diwakili oleh orang-orang yang kredibilitasnya tidak diragukan. Jadi, pola hubungan *civil society* dengan bisnis barangkali juga berbeda antara dulu dengan sekarang. Silahkan teman-teman yang masih ingin memperjuangkan dengan cara lama, tetapi dibutuhkan suatu modal baru.

Kemudian yang tentang *terorism*, tampaknya Pak Marcus yang lebih relevan untuk menjawab, sebagai ahlinya.

Untuk Mbak Mian, dari data menunjukkan bahwa untuk *mortgage*, rasio orang membeli rumah dengan berhutang terhadap PDB itu masih jauh lebih kecil dibanding dengan nilai orang membeli rumah. Kemudian, rasio konsumsi yang dilakukan dengan berhutang terhadap PDB di Indonesia rasionya juga lebih rendah dibandingkan dengan rasio negara lain. Jadi sebetulnya, rasio berhutang kita itu masih sangat rendah. Makanya kita kurang maju, karena takut berhutang. Kenapa saya berkata begitu? *We are young population*. 66% dari total penduduk kita adalah penduduk usia muda dan produktif. Saya misalnya, berhutang itu di usia 30 hingga 40 tahun. Selesaikan cicilan rumah, jadi begitu usia saya mulai senja, saya tidak perlu lagi berhutang dan saya bisa menjadi lebih produktif karena sudah memiliki rumah dan kendaraan yang memadai.

Jika kita contohkan Jepang, Jepang hutangnya 235% dari PDB. Sedangkan kita turun terus. Saya kesal dengan Menteri Keuangan karena dia bangga rasio hutang turun. Menurut saya Menteri Keuangan itu goblok. Kenapa? Karena negara kehilangan kemampuan untuk membuat si produktif ini untuk benar-benar produktif. Bagaimana negara akan berhutang? Jadi bukan hanya warga yang berhutang, tetapi negara juga berhutang banyak. Tetapi negara akan lebih mampu membangun jalan, membangun *public transportation*, yang semua itu tidak bisa menunggu pajak yang naiknya lambat. Darimana kemudian kita dapat? *We are young population*. Coba Bang Ignas, kalau saya ke bank, wawancaranya panjang, kemudian juga general *check up* lengkap. Saya kemudian tau urin saya ada darahnya, setelah itu periksa 3 hari berturut-turut. Sedih kalau sudah tua. Oleh karena itu, mari berhutang sesuai dengan kemampuan. Jadi, level berhutang kita masih sangat rendah. Buktinya, misalnya si Rocki (?), bekerja di tempat saya (?), misalnya dikasih hutang tanpa bunga untuk beli motor, lancarnya luar biasa. Tidak pernah nunggak dan sebagainya. Lihat juga BTPN dalam memberikan pinjaman dan ternyata hutang yang bermasalah atau *bad debt* - nya dibawah 2%.

Selama ini masyarakat kecil tidak mempunyai akses terhadap keuangannya. Memiliki hutang berilit kepada lintah darat. Itu sebetulnya yang menjadi sumber masalah. Tetapi kembali lagi, saya setuju sepenuhnya kepada Mbak Mian bahwa ada perilaku, misalnya survei di daerah Depok, belanja terbesar untuk pulsa mengalahkan belanja untuk susu anak. Ironis sekali, tetapi itulah realitasnya. Saya tidak tau kenapa, tetapi itu juga karena keberhasilan kita; KPPU menghukum perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang men-charge sms Rp. 250 per sms. Sekarang Rp. 10, Rp. 20, dan dapat hadiah pula. Jadi keberhasilan itu ternyata ada eksesnya juga. Ya saya tidak taulah, akan tetapi gejala konsumerisme memang sesuatu yang dikawatirkan juga oleh *Bowman* (?),

oleh kajian-kajian *Bowman* (?). Nanti bisa kita bahas untuk melihat fenomena-fenomena masyarakat semacam itu.

Yang terakhir adalah mengenai kelas menengah. Sebetulnya bukan solidaritas kelas. Kelas menengah itu sebetulnya adalah jembatan untuk komunikasi “kelas borjuasi” dengan “proletar”. Akan bahaya jika tidak ada kelas menengah. *Head to head* antara “borjuasi” dengan “proletar”, akan kacau terus. Dia sebetulnya penyeimbang, perannya masing-masing. Dan tentu saja jika dilihat dari komposisi yang saya gambarkan tadi, memang tidak membedakan fungsinya; karena ada kelas menengah pekerja dan ada kelas menengah pengusaha. Yang menjadi *concern* saya adalah kalau ekonomi tumbuh seperti struktur sekarang, maka kelas menengahnya akan terdiri dari orang-orang yang berjas, berdasi, yang kerja di segitiga emas, di sektor keuangan, dan memang hampir tidak pernah peduli dengan perubahan. Itulah kelompok *status quo*, yang baru bergerak kalau dia terganggu kepentingannya. Dulu, mereka mau kita ajak demo untuk menjatuhkan Pak Habibie dan Pak Harto, karena indexnya sudah mendekati ke angka nol, barulah mereka mau mogok. Sempat mogok dulu kita setiap hari setengah jam. Bukan mogok yang *full*. Nah, saya tidak suka dengan kelas menengah yang berdasi di segi tiga emas itu. Saya sebenarnya secara pribadi berteman. Dulu waktu demo, mereka cuma menonton dari atas, dari gedung pencakar langit, sedangkan demo di bawah. Kurang ajar. Itulah mereka, *free riders* demokrasi.

Yang paling radikal adalah buruh dan buruh adalah fungsi dari industri. Oleh karena itu industrinya harus kita dorong dan itulah yang paling parah sekarang karena kita lihat jumlah orang yang bekerja di sektor industri menurun, dari segi jumlah persentasenya menurun terus. Dan kontribusi industri manufaktur juga menurun terus. Memperjuangkannya bagaimana saya juga tidak tau. Saya sudah berbasa-busa membahasnya. Di Surabaya, setelah lumpur Lapindo, dulu kalau tidak salah pertumbuhan industri manufaktur di Surabaya atau di Jawa Timur selalu lebih tinggi dari PDRB (?). Tetapi setelah lumpur Lapindo, selalu lebih rendah dari PDRB-nya. Tetapi kalau saya salah, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih.

Dr. Ignas Kleden, Moderator

Sekarang jam 21.30. Untuk menghormati semua orang dan jam kerjanya, kita akan menutup diskusi ini. Kita patutlah untuk mengucapkan terima kasih Dr. Marcus dan Pak Faisal atas pertukaran pikiran yang berlangsung malam ini.

Tadi di kemukakan beberapa hal yang saya kira patut menjadi pemikiran kita lebih lanjut. Misalnya dalam kasus di Indonesia, hubungan antara demokrasi dan politik yang efektif, sebetulnya tidak terlalu langsung kelihatan. Pertanyaan buat kita adalah apa yang merupakan insentif politik yang mendorong perbaikan pelayanan publik jadi saya kira, dari kenyataan empiris yang tadi dilukiskan, relasinya tipis. Pelayanan publik belum bagus, tetapi tingkat kepuasan terhadap demokrasi bagus. Tetapi kita tetap ingin bahwa demokrasi menghasilkan pelayanan-pelayanan publik. Jadi insentif-insentif apa yang sebetulnya bisa kita dedikasikan dan dorong supaya itu bisa menghasilkan pelayanan publik. Saya kira itu bahan diskusi untuk waktu yang lain.

Kemudian yang kedua, untuk Mas Faisal, memang pajak kita rendah. Tetapi bagaimana Mas, tidak dijawab sekarang juga tidak apa-apa, bahwa yang ingin saya kemukakan; bagaimana hubungan antara pajak dengan pelayanan publik. Memang negara tidak bisa membayar terlalu banyak untuk pelayanan publik karena pajaknya rendah. Tetapi mungkin juga sebaliknya, orang tidak mempunyai banyak bukti bahwa perhatian terhadap pelayanan publik akan meningkat kalau orang menyumbang lebih banyak dalam pajaknya. Bagaimana hubungan diantara hal itu, mungkin bisa dijawab kali yang lain ya Mas.

Saya kira saya akan menutup diskusi malam ini. Terima kasih atas pertukaran pikiran dan sumbangan gagasan yang diberikan malam ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam.

-Selesai-